

DEFENDING NATION UPHOLDING NORM: NAHDLATUL ULAMA-GOVERNMENT RELATION IN AULA'S MAGAZINE REPORTING 1984-1998

Muhammad Haekal Ali Mahjumi

Universitas Airlangga
mhaekalam13@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis bagaimana Majalah Aula memberitakan dan mengamati hubungan NU dan pemerintah Orde Baru. Majalah Aula merupakan media massa milik NU yang terbit pertama kali pada tahun 1978 dan menjadi media profesional pada tahun 1984, tepatnya pada Muktamar 1984 di Situbondo. Dengan membaca kembali konten-konten Majalah Aula yang terbit pada tahun 1984-1998, penelitian ini ingin melihat sikap para aktor NU dalam merespon kebijakan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi NU-pemerintah cukup dinamis. Dalam isu-isu tertentu NU bersikap yang sangat kritis. Namun saat NU menerima Pancasila sebagai ideologi pada Muktamar 27 Situbondo, NU mengambil sikap lebih akomodatif. Kendati demikian ada kecenderungan yang bersifat ambigu yang tidak mudah dipahami oleh publik secara luas dengan komentar kyai NU yang berbeda dengan sikap organisasi. Sebagai media komunitas, pemberitaan Aula kurang obyektif karena selalu mendukung kebijakan organisasi meskipun pada kenyataannya berbeda dengan sikap kyai NU secara umum.

Kata Kunci: Majalah Aula, NU, Orde Baru, Kritis-Akomodatif-Ambigu

Abstract

This article examines how Aula Magazine covered and observed the relationship between Nahdlatul Ulama (NU) and the New Order government. Aula Magazine is an NU-owned mass media outlet that was first published in 1978 and transitioned into a professional media platform in 1984, coinciding with the 1984 Muktamar (National Congress) in Situbondo. By re-examining the content of Aula Magazine published between 1984 and 1998, this research aims to identify the stances of NU actors in responding to state policies. The findings indicate that the relationship between NU and the government was notably dynamic. On certain issues, NU maintained a highly critical position. However, following the formal acceptance of Pancasila as the sole ideology at the 27th Muktamar in Situbondo, NU adopted a more accommodative stance. Nevertheless, there was an ambiguous tendency that proved difficult for the public to decipher, characterized by

discrepancies between the commentaries of NU kyais (scholars) and the official organizational position. As a community media outlet, Aula's reporting lacked objectivity, as it consistently supported organizational policies even when they diverged from the consensus among NU kyais.

Keywords: Aula Magazine, Nahdlatul Ulama, New Order, Critical-Accommodative-Ambiguous

PENDAHULUAN

Hubungan NU (*Nahdlatul Ulama*) dengan pemerintah berjalan secara dinamis sejalan dengan perubahan peta politik nasional. Hubungan tersebut ada kalanya dekat, jauh dan netral. Pada suatu masa, NU pernah menjadi bagian dari pemerintah. Di masa yang lain NU pernah menjadi kelompok kritis dan bahkan tidak berada pada posisi keduanya.¹ Hal tersebut sejalan dengan perubahan sikap NU dalam politik yang ditunjukkan pada masing-masing periode.

NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. NU lahir di Surabaya, 31 Januari 1926. Dalam perkembangannya, NU mengalami transformasi dari organisasi sosial menjadi partai dan ikut Pemilu 1955 dan 1971. Setelah itu NU menjadi bagian dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang ikut Pemilu pada tahun 1973, 1977 dan 1982. Pada tahun 1984, NU keluar dari PPP dan memproklamkan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan. Peristiwa yang menandai arah baru gerakan ulama yang didirikan oleh K.H. Hasyim As'ary adalah Mukhtar NU ke-27 di Situbondo. Pada tahun 1998, NU kembali terlibat dalam politik praktis ketika pimpinan PBNU memfasilitasi pendirian PKB.

Memasuki periode Orde Baru, NU berada dalam posisi yang tidak ideal. Pada masa awal pemerintahan, Orde Baru mengeluarkan kebijakan fusi partai pada tahun 1971 dengan tujuan menjaga stabilitas sosial-politik setelah peristiwa G30S/PKI.² Pada awalnya, NU menolak kebijakan tersebut karena bukan kebutuhan yang mendesak. Meskipun demikian, NU akhirnya berfusi dengan partai-partai Islam lainnya dengan membentuk

¹ Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Lkis Pelangi Aksara, 1994, hlm. 90-127.

² M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 202.

partai baru bernama PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Sejak Orde Baru berdiri sampai tahun 1983, hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru berjalan tidak kondusif dikarenakan kebijakan-kebijakan negara yang sulit diterima NU. Hubungan tersebut menyebabkan NU berubah menjadi kelompok kritis yang berdampak pada kiprah politiknya sekitar tahun 1980-an.³

Kondisi yang dialami NU pada masa Orde Baru sebelum tahun 1983 telah menimbulkan konflik baik berasal dari internal maupun eksternal. Untuk menghindari situasi yang lebih merugikan, beberapa tokoh NU sepakat untuk mengembalikan marwah organisasi sesuai Khittah 1926. Pada Mukhtar ke-27 di Situbondo yang berlangsung di Bulan Desember tahun 1984, NU memutuskan untuk kembali sebagai organisasi sosial keagamaan. Di sisi lain, dalam keputusan yang disebut sebagai “Kembali ke Khittah 1926”, NU juga berusaha memperbaiki kembali hubungannya dengan pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu, pasca Mukhtar 1984, NU menunjukkan sikap yang berlawanan dengan masa awal Orde Baru.

Berita pasca Mukhtar Situbondo tahun 1984 menarik perhatian media massa. Salah satu media yang memberitakan adalah Majalah *Aula*. Media massa milik NU ini berdiri secara profesional pada tahun 1984 dengan tujuan menyampaikan segala informasi tentang organisasi kepada pembaca. Selain menampilkan tulisan yang berisi seputar dakwah, *Aula* juga berperan penting dalam memberitakan hubungan NU dengan pihak luar. Termasuk ketika memberitakan hubungan NU dan pemerintah Orde Baru tahun 1984-1998.

Majalah *Aula* merupakan media massa milik NU yang dibentuk untuk memberitakan aktivitas organisasi selama satu bulan penuh. Berdirinya *Aula* tidak lepas dari keinginan peserta Penataran Mubaligh NU pada tanggal 13 sampai 15 Desember 1974 yang menginginkan adanya media informasi yang menghubungkan NU dengan umat setelah beberapa kali gugur sebelum berkembang seperti Koran *Duta Masyarakat*, Majalah *Risalah Islam*, dan lain sebagainya.⁴ Pada Kamis Kliwon awal Januari

³ *Ibid*: 205.

⁴ Majalah *Aula*, "Mengawal Zaman: Renungan Hari Ulang Tahun ke-16 Majalah *Aula*," Februari 1993, hlm. 8.

1975, Pengurus Wilayah Bagian Dakwah di Jawa Timur yang diketuai H. Mohammad Saleh Mukmin membangkitkan kembali media massa milik NU yang bernama *Buwilnu* (Buletin Nahdlatul Ulama). Ketika memasuki bulan Agustus 1975, *Buwilnu* berubah nama menjadi *Risalah* berdasarkan keputusan Konferensi Wilayah Bagian Dakwah yang digelar pada saat itu. Dalam perjalanannya selama satu tahun, *Risalah* mengalami banyak hambatan yang dihadapi. Pada bulan Mei 1976, *Risalah* memutuskan berhenti produksi dikarenakan beberapa faktor seperti pergantian Ketua Bagian Dakwah dan semangat produksi yang menurun.

Majalah kembali berproduksi pada akhir November 1978 berdasarkan Surat Keputusan PWNU Jawa Timur No. 183/PW/Ktps/XII/78 pada tanggal 9 Desember 1978.⁵ Dalam masa tersebut, nama *Buwilnu* kembali digunakan sebagai tajuk majalah. Pada tahap ini, *Buwilnu* berusaha menjadi media profesional. Jika ketika saat bernama *Risalah* terbit ketika diperlukan, *Buwilnu* mulai konsisten untuk terbit setiap bulan, meskipun dalam penerapannya hanya mampu mencetak delapan sampai sepuluh kali dalam setahun.

Oleh karena itu, keberadaan Majalah *Aula* sangat penting untuk dibahas dalam menyikapi langkah NU pasca Muktamar ke-27 di Situbondo. Terlebih dalam kurun waktu 1984 sampai 1998, ada banyak sekali isu yang berkaitan tentang NU dengan pemerintah yang diberitakan berbagai media massa. Penelitian ini berfokus menganalisis pemberitaan *Aula* mengenai relasi NU dengan Orde Baru berdasarkan Majalah *Aula* yang terbit dari akhir tahun 1984 hingga 1998. Penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah isi berita Majalah *Aula* ditulis dengan gaya bahasa yang objektif menyampaikan realita atau terkesan subjektif karena keterikatan dengan NU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis yang terbagi menjadi lima tahap yaitu pemilihan topik, pemilihan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sejarah, mengecek kevalidan sumber), interpretasi (menganalisis dan

⁵ Lia Hadis Sholikha, *Sejarah Perkembangan Majalah Aula Tahun 1978–2019* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hlm. 24

menyusun sumber agar tersusun secara kronologis), dan penulisan (historiografi).⁶ Pemilihan topik didasarkan pada belum adanya penelitian yang mengkaji tentang pemberitaan Majalah *Aula* tentang peristiwa tertentu. Memasuki tahap heuristik, peneliti mengumpulkan berbagai data primer berupa Majalah *Aula* yang diakses dari Kantor PWNNU Jawa Timur. Selain itu, data primer lainnya berupa koran nasional yang sesuai pada temporal penelitian diperoleh dari Perpustakaan Medayu Agung serta Perpustakaan AWS Stikosa yang memberitakan tentang topik yang sedang diteliti.

Di samping data primer, peneliti juga menggunakan buku serta artikel jurnal yang diperoleh baik dari perpustakaan, koleksi pribadi, maupun publikasi yang diterbitkan secara daring. Tahap selanjutnya ialah verifikasi sumber untuk mengetahui apakah data yang digunakan sesuai dengan penelitian. Tahap berikutnya ialah melakukan interpretasi sumber yang menggunakan teori analisis wacana dalam menganalisis isi berita *Aula*. Tahap akhir dari penelitian adalah historiografi dengan menuliskan hasil interpretasi berdasarkan data-data yang digunakan untuk menjadi sebuah penelitian sejarah.

PEMBAHASAN

NU dan Pemerintah Masa Orde Lama (1955-1965)

Hubungan yang dibangun NU dengan pemerintah Orde Lama berlangsung secara dinamis. Ada kalanya bersifat harmonis, ada juga situasi saat NU menjadi kelompok kritis sehingga dinilai beberapa kelompok bersifat oportunis. Namun, jika dibandingkan dengan Orde Baru, pola yang dibangun NU dengan Orde Lama cenderung lebih banyak bersifat akomodatif (pengecualian pada akhir masa pemerintahan). Dengan berpolitik secara akomodatif, NU menjadi lebih mudah menduduki posisi strategis dan mendapatkan kekuatan politik lebih luas dari para birokrat.

Ketika sistem pemerintahan Indonesia mulai terbentuk, NU serius mengambil kesempatan untuk terlibat dengan pemerintah secara lebih

⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013, hlm. 69.

dalam. Cara agar mereka bisa terlibat adalah dengan menjadi bagian partai. NU pada waktu itu bergabung dengan Masyumi bersama organisasi-organisasi lainnya seperti Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Pada tanggal 3 November 1945, Indonesia yang baru saja merdeka mengeluarkan kebijakan multi-partai agar masyarakat bebas menentukan pemikiran mereka dan dapat diarahkan ke jalan yang teratur.⁷ Kebijakan ini disambut positif oleh rakyat serta politisi, termasuk dari kelompok Islam. Mereka kemudian menggelar Mukhtar Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945 dengan menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya kekuatan politik umat Islam pada saat itu.⁸

Meskipun berhasil mendapatkan jabatan krusial di pemerintahan, hubungan NU dengan Masyumi hanya berjalan singkat. Masalah ini disebabkan karena faktor kepentingan terutama perbedaan sikap antara NU yang didominasi ulama tradisional dengan kader partai lainnya yang lebih modernis. NU pada akhirnya memutuskan keluar dari Masyumi berdasarkan keputusan dari Mukhtar ke-19 di Palembang yang berlangsung selama lima hari dari tanggal 26 April sampai 31 Juli tahun 1952.⁹

Keluarnya NU dari Masyumi menandai awal dari kiprah mereka bersaing dalam politik praktis. Tugas NU saat ini adalah bagaimana cara mereka memenangkan Pemilu perdana yang diselenggarakan tahun 1955. Melihat peta persaingan politik yang didominasi oleh PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), dan Masyumi akan berjalan ketat, NU mulai membangun kekuatan dari berbagai bidang mulai dari ekonomi, sosial, serta politik.¹⁰ Setelah usaha tersebut telah berhasil dicapai, NU mulai mendekati pejabat pemerintahan untuk membangun kekuatan politik. Pada Juli 1953, Kabinet Wilopo berakhir dan digantikan oleh Ali Sastroamidjojo. Dalam kabinet kali ini, NU kembali masuk dalam susunan kementerian bersama PNI serta PKI.¹¹ Meskipun dikritik oleh

⁷ M. Ali Haidar, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁸ *Ibid.*

⁹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Lkis, 2007, hlm. 131.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 131-147.

¹¹ Martin Van Bruinessen, *Op. Cit.*, hlm. 34.

beberapa pihak terutama Masyumi karena tidak mewakili umat Islam, NU berhasil menduduki tiga jabatan yang diberikan: Wakil Perdana Menteri II, Menteri Agama, dan Menteri Pertanian.¹² Ketiga tawaran tersebut sangat strategis untuk memperlihatkan kekuatan NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia.

Pemilu pertama akhirnya terlaksana pada tahun 1955. NU sebagai peserta baru mampu bersaing dengan kontestan-kontestan lama seperti partai nasionalis, komunis, bahkan dari partai Islam sendiri. Dari perolehan suara untuk anggota DPR, NU menduduki peringkat ketiga dengan persentase suara sebesar 18,4%.¹³ Sementara untuk pemilihan anggota Konstituante, NU tetap menempati peringkat ketiga dengan persentase suara sebanyak 18,47%.¹⁴ Keberhasilan NU di Pemilu 1955 membawa mereka kembali mengisi kursi kabinet.

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin NU terjebak dalam pengaruh politik Soekarno. Di satu sisi menolak eksistensi PKI, namun di sisi lain masih ingin tetap berada di pemerintahan. Hal ini juga turut memecah belah NU waktu itu yang terbagi menjadi dua pihak antara kubu anti Demokrasi Terpimpin dan pragmatis. Alasan moral merupakan argumen mereka yang menolak kebijakan Soekarno karena telah membubarkan parlemen yang dipilih oleh rakyat.¹⁵ Sementara dari kelompok pragmatis, ada keyakinan bahwa sikap melawan lebih berbahaya daripada menerima tanpa protes.¹⁶ Konflik internal tersebut dapat diakhiri setelah Syuriah mengeluarkan keputusan untuk warga NU yang ingin terlibat dalam kabinet baru Demokrasi Terpimpin. Pada perkembangan berikutnya, banyak warga NU yang menerima ajakan kelompok pragmatis untuk bergabung dalam kabinet baru terutama setelah DPR Gotong Royong (DPR-GR) dibentuk awal tahun 1960.¹⁷

¹² Greg Barton and Greg Fealy. *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKiS, 1997, hlm. 23-24.

¹³ Indonesia, Arsip Nasional Republik. "Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955." *Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia* (2019): 142.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 145.

¹⁵ Greg Barton and Greg Fealy, *Op. Cit.*, hlm. 29-30.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1997: 29.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

Keputusan NU menerima Demokrasi Terpimpin tidak berjalan mulus. Partai kesulitan menandingi kekuatan PKI, namun tidak dapat mengambil sikap atas ketidaksukaan tersebut karena akan bernasib seperti Masyumi. Pemerintah cenderung memihak ke kelompok kiri yang diperlihatkan dari beberapa kebijakan seperti pembentukan Front Nasional serta kunjungan Soekarno ke negara-negara Komunis.¹⁸ Lemahnya pengaruh NU pada Demokrasi Terpimpin mengakibatkan perpecahan internal. Pada saat itu, lahir kelompok baru yang disebut Kelompok Militer yang pemuda-pemudi santri dari Ansor, Ikabepi, IPNU, dan PMII.¹⁹ Mereka merupakan kelompok yang dibentuk untuk melawan pengaruh komunisme. Dari kelompok tersebut, muncul Subchan ZE yang memimpin gerakan untuk melawan Komunisme.

Pasca peristiwa G30S/PKI, Subchan ZE berhasil menggiring warga NU untuk memerangi komunisme. Pada masa tersebut, NU telah menunjukkan sikap kritisnya terhadap pemerintahan Orde Lama. Dimulai dari wilayah parlemen yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan presiden, Achmad Sjaichu, pimpinan NU sekaligus juru bicara DPR-GR, menyetujui pembersihan anggota DPR-GR dan meminta MPRS melakukan sidang.²⁰ Tindakan ini kemudian didukung anggota DPR-GR sekaligus NU lainnya seperti Nurdin Lubis yang mengusulkan Soekarno dipecat dan diadili atas keterlibatannya dalam Gerakan 30 September.²¹ Usulan tersebut disetujui dan menjadi awal dari prosedur pemecatan Soekarno.

NU dan Pemerintah Masa Orde Baru (1966-1983)

Walaupun memberikan sumbangsih atas berakhirnya Orde Lama, bukan berarti NU leluasa terlibat dalam sistem pemerintahan baru. Muncul banyak ketidaksepakatan antara partai dengan angkatan darat baik menyangkut kepentingan negara maupun umat Islam. Dari situasi seperti

¹⁸ Laode Ida. *Anatomi Konflik, NU, Elit Islam, dan Negara*. Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 27-28.

¹⁹ Greg Fealy. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Lkis, 2007, hlm. 312.

²⁰ Andree Feillard. "Islam Tradisional dan Tentara dalam Orde Baru." *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama dengan Negara*. LKiS (1997): 41.

²¹ Greg Fealy, *Op. Cit.*, hlm. 349.

ini, hubungan NU dengan angkatan darat menjadi renggang dan dalam beberapa tahun kemudian, NU bertransformasi menjadi kelompok kritis menanggapi kebijakan pemerintah.

Sebelum Pemilu 1971 dilaksanakan, sejumlah peristiwa menunjukkan bagaimana NU beberapa kali mengkritik kebijakan pemerintah. Dimulai dari penolakan Perpres 2/1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia, 'sistem distrik' untuk pemilihan anggota-anggota DPR, dan menolak rencana agar tentara mendapatkan kursi sebesar 50% di DPR.²² Kritikan ini kemudian dideklarasikan dalam muktamar di Bandung tahun 1967 dengan menghasilkan salah satu keputusan penting yakni mendesak diadakannya Pemilu secepat mungkin.²³

Pemilu akhirnya terlaksana tahun 1971 setelah beberapa kali mengalami penundaan. Pemilu yang menunjukkan bagaimana Golkar sangat mendominasi perolehan suara. Golkar berhasil meraih 62,8 % suara dan menjadi pemenang dalam pemilihan umum.²⁴ Kemenangan Golkar dalam Pemilu 1971 memberikan kesempatan melegalkan rencana kebijakan sebelumnya. Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan yakni tentang penyederhanaan partai atau lebih dikenal dengan 'fusi partai'. Pemerintah membuat kebijakan untuk merumuskan format politik yang baru agar konflik pada pemerintahan sebelumnya tidak terulang kembali yang diakibatkan berlakunya sistem multi-partai.²⁵ Rencana tersebut juga berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang menjadi misi utama pemerintah Orde Baru.

NU pada awalnya menolak keputusan tersebut karena tidak bersifat mendesak. Meskipun demikian, NU pada akhirnya menerima kebijakan fusi partai dengan bergabung membentuk partai Islam bersama Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islam), dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) tanggal 5 Januari 1973 dengan nama PPP

²² Andree Feillard, *Op. Cit.*, hlm. 46.

²³ *Ibid.*, hlm. 47

²⁴ Asep Saepuloh Muhtadi. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. LP3eS, 2004, hlm.107.

²⁵ M. Ali Haidar, *Op. Cit.*, hlm. 202.

(Partai Persatuan Pembangunan).²⁶ Selama bergabung bersama PPP, NU sering mengkritik pemerintahan Orde Baru karena tidak berpihak pada demokrasi serta umat Islam. Contoh seperti kampanye pemilu pada tahun 1971 serta 1977. Beberapa kali anggota Golkar seperti angkatan bersenjata serta anggota pemerintahan mengintimidasi calon pemilih supaya memilih mereka. Cara lainnya yang lebih ekstrem adalah dengan menyerang fisik secara langsung oleh kelompok yang berafiliasi dengan Golkar.²⁷

Dari sekian konflik, konfrontasi NU paling serius terjadi dari tahun 1978 sampai persiapan menuju Pemilu 1982. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi dua bahasan penting di parlemen dan berakhir dengan tindakan kontroversial NU berupa *walk out*. Dalam *walk out* pertama tepatnya pada Sidang Umum MPR 1978 ketika membahas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), NU bersama beberapa anggota PPP lainnya secara demonstratif meninggalkan ruangan sidang karena dua poin yang gagal disepakati, sementara untuk *walk out* kedua, NU memutuskan meninggalkan tempat dikarenakan menolak kesepakatan atas pemerintah terlibat dalam Pemilu 1982.²⁸

Menyikapi aksi *walk out*, pemerintah bereaksi dengan melakukan intervensi kepada PPP. Djaelani Naro ditunjuk sebagai ketua umum DPP PPP baru menggantikan Mintaredja. Pergantian kepemimpinan ke Djaelani Naro memberikan dampak signifikan bagi kepentingan politik NU sekaligus menunjukkan bagaimana Orde Baru mampu mengontrol sebuah kelompok selama kekuasaan mereka berjalan. Hak politik NU di PPP telah dikurangi dan ketika menjelang Pemilu 1982, kurang lebih 29 orang tokoh NU tergusur dalam pencalonan mewakili partai. Nama-nama seperti Jusuf Hasjim, Imron Rosjadi, dan Saifuddin Zuhri diletakkan pada posisi terbawah dari *draft* sehingga sangat sulit untuk dipilih.²⁹

Namun relasi NU-pemerintah mengalami perbedaan pasca Muktamar ke-27 tahun 1984. NU tetap kritis terhadap pemerintah, namun tetap menjaga hubungan baik untuk kepentingan yang lebih besar demi

²⁶ *Ibid.*, hlm. 200.

²⁷ Martin Van Bruinessen, *Op. Cit.*, hlm.104-105.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

²⁹ M. Ali Haidar, *Op. Cit.*, hlm. 205.

kebangsaan dan NKRI. Sikap ini sebagai bentuk dari cara NU dalam berkhidmah pada negara sebagai implementasi ajaran *ahlussunnah waljamaah*.

Membela Bangsa Menjunjung Norma; Relasi NU Pemerintah (1984-1998)

Relasi NU-pemerintah pasca Mukhtar Situbondo mengalami situasi yang berbeda. Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, menjadikan hubungan NU semakin harmonis namun tetap menjaga sikap kritis. Sikap positif pemerintah dapat dilihat dari beragam komentar pemerintah waktu itu.

“Diterimanya Pancasila menjadi momen bagus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Warga NU juga bebas menggunakan hak politiknya masing-masing tanpa paksaan memilih Golkar.” Komentar Sudharmono SH, Ketua Umum DPP Golkar.³⁰

Tulisan di atas merupakan komentar dari pihak pemerintah yang menyambut positif hasil Mukhtar 1984 NU. Selain menampilkan komentar dari pihak luar, *Aula* juga menampilkan komentar dari tokoh-tokoh mereka sendiri mengenai alasan mengapa warga NU harus menerima asas tunggal.

“Jelaslah bahwa NKRI adalah negara nasional yang di wilayahnya dihuni oleh penduduk sebagian besar memeluk agama Islam. Dengan demikian, Republik Indonesia adalah bentuk final upaya dari seluruh nasional teristimewa kaum muslimin untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.” Komentar K.H. Achmad Siddiq, Rais A’am PBNU”.³¹

“Mengapa pemerintah berprinsip bahwa asas tunggal dijadikan ukuran pokok (sehingga kita dapat bermukhtar)? Masalahnya sederhana, pemerintah ingin negara tetap kokoh. Artinya, negaranya tegak,

³⁰ Majalah *Aula*. "Mereka Menanggapi Hasil Mukhtar." Januari 1985, hlm. 22.

³¹ Majalah *Aula*. "Mengapa NU Menerima Asas Tunggal Pancasila?" Maret 1985, hlm.17.

pemerintahan kuat, dan tanpa gangguan manapun.” Komentar Gus Dur, Ketua Umum PBNU.³²

Pada edisi yang sama, *Aula* melaporkan pertemuan petinggi NU dengan Presiden Soeharto di Bina Graha yang terjadi pada 14 Februari 1985. Dalam momen tersebut, *Aula* menarasikannya sebagai berikut:

“Kepala negara juga menilai, dengan keputusan di atas, NU telah mengambil suatu keputusan yang sangat fundamental. Yaitu sebagai koreksi terhadap kesalahan ideologis selama ini yang masih berjalan di Indonesia”.³³

Selama tahun 1985, hubungan NU dengan pemerintah pasca Muktamar 1984 menjadi sorotan utama *Aula*. Dalam menunjukkan langkah serius NU membangun kembali hubungan baik dengan Orde Baru, *Aula* melakukan propaganda dengan mengangkat tulisan baik berupa opini, ceramah, komentar seseorang, serta melampirkan keputusan Muktamar 1984 dalam beberapa edisi cetakan. Dengan cara demikian, *Aula* memiliki tujuan agar informasi NU mengenai keputusan Muktamar 1984 dapat diimplementasikan oleh para pembaca. Cara ini juga bertujuan agar pembaca terutama warga NU menilai bahwa tidak ada konflik dengan pemerintah.

Pada edisi di beberapa tahun berikutnya, kerja sama antara NU dengan pemerintah pusat menunjukkan hasil yang positif. Beberapa kerja sama dalam berbagai bidang telah dilakukan oleh mereka berdua. Salah satu contohnya seperti melakukan kerja sama dengan MA dalam bidang hukum.

“Acara ini memiliki arti penting dari masing-masing pihak. Kehadiran pemerintah dalam forum menunjukkan betapa pentingnya acara tersebut. Selama ini, hakim belum memiliki pedoman menangani hukum Islam. Oleh karena itu, harapannya akan dihasilkan sebuah buku pedoman dalam memutuskan perkara yang menyangkut hukum Islam. Sedangkan dari NU, materi yang diajukan oleh MA

³² *Ibid.*, hlm. 37.

³³ *Ibid.*, hlm. 13.

menyangkut kepentingan mereka sendiri yakni syariat Islam yang diberlakukan pemerintah di negara Indonesia”.³⁴

Selain tentang hukum, NU juga merasakan keuntungan setelah menerima asas tunggal dari bidang dakwah. Pasca Mukhtar 1984, NU menyatakan bahwa di tahun 1987, keluhan tentang pembatasan-pembatasan kebebasan ceramah mulai melonggar. Ulama maupun kyai tidak memerlukan izin ke KUA jika berkeinginan mengadakan pengajian-pengajian umum.³⁵ Situasi yang sangat kontradiktif dibanding sebelum tahun 1987 di mana sebuah pengajian tanpa adanya izin bisa dibawa ke ranah hukum.

Selain NU, pemerintah juga merasakan keuntungan setelah memperbaiki hubungan dengan organisasi Islam tersebut. Dalam bidang politik, pemerintah melalui Golkar sebagai alat politik mereka berhasil menambah jumlah kursi dalam Pemilu 1987. Hal ini disebabkan karena NU pada saat itu telah membebaskan warganya untuk menentukan hak politik masing-masing. Berdasarkan laporan dari *Tempo* yang ditampilkan *Aula* dalam edisi Juli 1987, jumlah suara Golkar dari warga NU meningkat lebih dari 50 % ketika masa Pemilu 1987.

“Bila tahun 1982 warga NU ke Golkar hanya 12,25%, maka dalam pemilu ‘87, naik menjadi 80,64%”.³⁶

Selain memberitakan hubungan kedua pihak tersebut secara positif, *Aula* mulai menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah melalui berita yang mereka angkat. *Aula* mengkritik sikap pemerintah yang dinilai gagal menjaga nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, *Aula* membuat tulisan berupa dukungan atas berdirinya Fordem (Forum Demokrasi) pada bulan Mei 1991.

“Sebagaimana keterangan yang diberikan Gus Dur akhir bulan Ramadhan lalu, Fordem lahir didasari berbagai keprihatinan. Antara

³⁴ Majalah *Aula*. "NU-MA Sebuah Contoh Kerja sama." Mei 1986, hlm.13.

³⁵ Andree Feillard. "Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaharuan." dalam Ellyasa KH. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LkiS, 1994) (1994), hlm. 43.

³⁶ Majalah *Aula*. "Kajian Naiknya Jumlah Kursi Non-NU." Juli 1987, hlm. 25.

lain makin menggejalanya kelompok primordial, kesukuan atau kelompok lainnya yang mengancam kesatuan nasional dan demokrasi. Kelompok itu tentu saja sangat mengutamakan anggota kelompoknya -salah atau benar- dan mengabaikan kelompok lainnya”.³⁷

Tulisan *Aula* kemudian mendapat balasan dari kalangan pemerintah seperti yang ditampilkan Majalah *Tempo* pada 13 April 1991

“Pendapat ABRI sudah jelas. Forum semacam itu *ndak* perlu. Kalau memiliki ide-ide yang akan dikembangkan, masuk saja ke wadah-wadah yang sudah ada.... Mereka (FD) mengkritik adanya pengelompokan-pengelompokan. Tapi, mereka malah mengelompok. Kan nggak benar. Itu aneh”.³⁸

Meskipun NU masih dihubungkan sebagai kelompok kritis terhadap pemerintah, NU tetap mendukung berjalannya pemerintah Orde Baru seperti dalam menyukseskan Pemilu 1992 dan memberikan dukungan atas kembali terpilihnya Soeharto sebagai presiden. Pada edisi Maret 1993, *Aula* membuat tulisan dengan judul *Anak Petani Yang Menjadi Bapak Bangsa*;

“NU memiliki kesan sendiri terhadap Pak Harto. Seperti disebutkan tadi, yang membuat dukungan pertama agar Pak Harto kembali diangkat sebagai presiden adalah resolusi Jamaluddin Malik, mewakili NU. Ini dianggap cikal bakal naiknya NU ke pucuk kepemimpinan Indonesia. Selanjutnya, setiap SU MPR yang sudah berlangsung lima kali, NU selalu memberi dukungan. Bahkan untuk SU MPR 1973 ini, rapat pleno PBNU yang baru saja berlangsung juga sudah menyatakan dukungannya”.³⁹

Mematuhi pemimpin negara merupakan kewajiban bagi NU. Oleh karena itu, masih tentang tulisan di atas, *Aula* mengutip hadist sebagai berikut:

³⁷ Majalah *Aula*. "Politik Orang Tidak Berpolitik." Mei 1991, hlm. 9.

³⁸ *Tempo*. "Suara-suara di Tengah Forum." 13 April 1991, hlm. 25.

³⁹ Majalah *Aula*. "Anak Petani yang Menjadi Bapak Bangsa." Maret 1993, hlm. 20.

“Kami para nabi diperintahkan menempatkan manusia sesuai dengan fungsinya, serta berkata menurut kadar kemampuan akalnya.” H.R. Abu Dawud dari sayidina Aisyah RA”.⁴⁰

Alasan *Aula* mengutip sebuah hadist dalam tulisannya tidak lepas dari profil NU yang beraliran *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Hal ini kemudian diterapkan oleh *Aula* dalam tulisannya menanggapi terpilihnya Soeharto sebagai presiden dengan mengatakan bahwa Islam diperintah untuk memilih manusia sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, Soeharto merupakan sosok yang pantas untuk dipilih kembali dari sudut pandang *Aula*.

Berita *Aula* mengenai hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru masih berlanjut dalam beberapa edisi ke depan. Seperti pada edisi Maret 1994 ketika presiden beserta wakilnya menghadiri dan memuji atas digelarnya Munas Rabithul Ma'ahid Islamiyah (RMI).⁴¹ Kemudian pada edisi tahun 1995, *Aula* mengomentari keinginan pemerintah untuk tetap bekerja sama dengan NU.

“Umat NU bisa memanfaatkan pemerintah dalam pembinaan organisasi. Jangan bekerja sendiri dan memperlihatkan sikap takabur dengan mengatakan hanya lembaganya sendiri yang kuat... Dalam sistem negara Pancasila, tidak ada istilah oposan, namun kritik yang membangun akan diterima pemerintah”.⁴²

“Melalui upaya aktualisasi dan implementasi Khittah 1926, maka kita semua merasa yakin bahwa tekad NU untuk memajukan dan mencerdaskan umat merupakan wujud dari kepedulian NU berkontribusi dalam pembangunan nasional”.⁴³

Saat memasuki awal tahun 1996, *Aula* memberitakan respon baik pemerintah terhadap NU. Ketika NU kembali dihadapi masalah internal seperti yang terjadi pada Desember 1995,⁴⁴ pemerintah mendukung penuh

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Majalah *Aula*. "Bau Politik di Munas RMI." Maret 1994, hlm. 12.

⁴² Majalah *Aula*. "NU Butuh Perlindungan, Pemerintah Butuh Bimbingan." Januari 1995, hlm. 42.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁴ Greg Barton and Greg Fealy. *Op. Cit.*, hlm. 23-24.

keputusan NU versi kepemimpinan Gus Dur. *Aula* memberitakannya dalam rubrik Ummurisalah berjudul *Menilai Klip PBNU* dalam terbitan majalah bulan Februari 1996.

“Pemerintah berdasarkan asas legalitas, menganggap KPPNU tidak sah dan tidak diakui. KPPNU melanggar sikap resmi pemerintah yang hanya mengakui PBNU hasil Muktamar Cipasung dan sekaligus melanggar para ulama mereka sendiri.” Komentar Moh. Yogie selaku Menteri Dalam Negeri”.⁴⁵

Dari komentar yang ditampilkan *Aula*, terlihat bahwa pemerintah mendukung penuh NU versi Muktamar Cipasung meskipun Gus Dur sering mengkritik kebijakan mereka. Respon pemerintah menanggapi keberadaan NU tandingan sangat bagus sehingga ditampilkan *Aula* dalam rubrik tulisan majalah.

Ketika memasuki pertengahan sampai mendekati akhir tahun 1996, sorotan *Aula* terhadap hubungan NU-pemerintah berubah menjadi lebih kritis. Hal ini terjadi atas kekacauan yang terjadi di Indonesia saat itu. Contohnya seperti kericuhan tanggal 27 Juli 1996.⁴⁶ Peristiwa yang terjadi akibat konflik PDI dengan pemerintah ini menarik atensi *Aula*. Pada saat itu, *Aula* mengkritik pemerintah yang menuduh PRD sebagai pelaku dibalik kerusuhan 27 Juli 1996 seperti yang diberitakan Suara Karya.⁴⁷ Kritikan *Aula* ditulis dalam edisi September 1996

“Pada perkembangannya, inti masalahnya menjadi tidak aktual dibicarakan. Justru PRD yang dibesar-besarkan. Apakah kenyataan di lapangan juga sebesar yang diberitakan? PRD itu kan merupakan kelompok generasi muda yang ingin menyampaikan uneg-uneg dan aspirasi. Anak-anak itu kan tidak punya jabatan apa-apa. Mereka digambarkan seakan-akan mau merobohkan negara”.⁴⁸

⁴⁵ Majalah *Aula*. "Menilai Klip PBNU." Februari 1996, hlm. 26.

⁴⁶ Eko W et al., "Dwifungsi ABRI dalam Konflik Internal PDI 1976–1998," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020), hlm. 179–192, <https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.11162>.

⁴⁷ Suara Karya. "Kerusuhan di Jakarta Ditunggangi PRD." 30 Juli 1996, hlm. 1.

⁴⁸ Majalah *Aula*. "Membesarkan PRD, Melupakan Masalah." September 1996, hlm. 28.

Berita *Aula* lainnya tentang kritikan kepada pemerintah dibahas pada edisi November 1996. Peristiwa besar yang menjadi perhatian *Aula* serta NU adalah terjadinya kerusuhan di Situbondo dikarenakan kasus SARA yang terjadi pada Bulan Oktober 1996.

“Saya berharap masalah Situbondo bisa cepat diselesaikan oleh ulama-ulama NU Jawa Timur dengan para pejabat pemerintah di Jawa Timur. Ini penting, agar peristiwa itu tidak terulang lagi”.⁴⁹

Peristiwa nasional di atas yang terjadi dari tahun 1996 masih berlanjut sampai dua tahun ke depan. Pada tahun 1998, negara sedang mengalami fase krisis seperti masalah moneter dan demonstrasi di berbagai tempat. *Aula* turut berkomentar tentang hal ini

“Yang jelas dalam krisis ekonomi ini terjadi krisis kepercayaan satu sama lain. Pemerintah tidak percaya pada masyarakat dan masyarakat luntur kepercayaannya kepada pemerintah... Ulama NU yang memimpin masyarakat harus bisa menghindari hal itu. Artinya kita harus menegakkan, jangan ikut mengurangi kewibawaan pemerintah. Karena pertimbangan itulah dari dulu kita selalu berusaha menjaga situasi agar tidak keruh dalam dua tahun terakhir”.⁵⁰

Kritikan NU yang disampaikan *Aula* mendapatkan respon dari pemerintah. Ketika pemerintah membentuk kabinet baru untuk menyelamatkan negara dari masa krisis, *Aula* berusaha mengajak pembaca untuk mengikuti sikap NU mendukung pemerintah.

“Apa lagi kemudian PWNU Jawa Timur membuat seruan agar seluruh jajaran NU tidak mengadakan unjuk rasa yang bisa mengganggu ketenteraman umum dan memberi kesempatan kepada Kabinet Pembangunan VII untuk bekerja dengan baik. Apakah ini sekedar menunjukkan loyalitas NU? Atau memang ada warganya yang perlu *diback up. Wallahu a'lam*”.⁵¹

⁴⁹ Majalah *Aula*. "Semua Sama Susah." November 1996, hlm. 30.

⁵⁰ Majalah *Aula*. "Krisis Politik Akan Berlangsung Lima tahun." Maret 1998, hlm. 29.

⁵¹ Majalah *Aula*. "Kabinet Musim Badai." April 1998, hlm. 65.

Berita *Aula* pada edisi April 1998 di atas sama seperti ketika memasuki edisi Juni 1998. Dalam terbitan Bulan Juni yang lebih banyak memberitakan laporan atas lengsernya Soeharto dan dimulainya reformasi dengan ditunjuknya B.J. Habibie sebagai presiden, NU memberikan komentar atas peristiwa penting tersebut. *Aula* memberitakannya pada rubrik Ummurisalah.

“Menanggapi turunnya Presiden Soeharto dengan ungkapan, ‘saya menghargai sekali kerja sama yang terjalin dengan pemerintah selama ini, khususnya dengan Presiden Soeharto. Sekarang Soeharto mengakhiri era pemerintahannya. Dengan demikian, berakhirlah era Soeharto dan mulai era baru yang dipimpin oleh Pak Habibie berdasarkan konstitusi kita, UUD ’45 dan Pancasila... NU akan bekerja sama dengan semua pihak yang menjunjung tinggi konstitusi’”.⁵²

Rangkaian peristiwa yang terjadi terutama dalam dua tahun terakhir (1996-1998) menjadi perhatian *Aula*. Tulisan yang ditampilkan lebih banyak berisi berupa kritik, namun *Aula* juga berusaha menunjukkan sikap yang tidak melawan pemerintah dengan memberikan saran baik dari mereka maupun dari tokoh-tokoh NU sendiri. Berita-berita yang ditampilkan pada tahun tersebut telah menunjukkan bahwa *Aula* cenderung mengikuti sikap NU atas berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Sikap yang menggambarkan bahwa NU sangat menghargai atas peran pemerintah dalam menjaga persatuan dan NKRI, di mana NU merasa penting mendukung atas upaya tersebut. Meskipun dalam praktiknya NU tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan NU.

KESIMPULAN

Relasi NU dengan pemerintah selama kurun waktu 1984-1998 memiliki kecenderungan naik-turun dan cukup dinamis. Satu sisi bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, tetapi di sisi lain juga menerima dan bahkan mengambil keuntungan dari berbagai kebijakan pemerintah. Satu sisi ada beberapa sikap negara yang diterima maupun tidak oleh NU. Relasi tersebut dianggap sebagai bagian dari sikap membela

⁵² Majalah *Aula*. "Melungsur Lengseran Soeharto." Juni 1998, hlm. 16.

kepentingan kebangsaan dalam rangka menjaga keragaman dan keutuhan NKRI, sekaligus sebagai upaya untuk menjalankan norma ahlussunah waljamaah yang tercermin dalam prinsip perjuangan organisasi.

Sikap dan pandangan NU terhadap pemerintah tergambar dalam pemberitaan majalah *Aula* edisi tahun 1984 sampai 1998. Berdasarkan tulisan yang terdapat dalam Majalah, dapat diketahui bahwa *Aula* memiliki sedikit perbedaan sudut pandang dibandingkan media massa lainnya. Faktor utama yang mengakibatkan perbedaan tersebut di antaranya dikarenakan faktor kepentingan pemilik pers masing-masing.

Kecenderungan *Aula* pada NU mengakibatkan mereka sulit menempatkan posisi sebagai media independen. Seperti saat NU bekerja sama dan mengapresiasi langkah pemerintah, *Aula* meresponnya dengan bahasa yang mendukung. Sementara itu, jika NU mengkritik sikap pemerintah, *Aula* bereaksi dengan mengkritik namun juga memberikan saran bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemberitaan *Aula* tentang hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru tahun 1984-1998 cenderung bersifat subjektif dikarenakan ikatan *Aula* dengan organisasi NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko W, Alphonsius Rodriquest, Kurniawati, Yanuardi, M. Hasmi, dan Maulani. "Dwifungsi ABRI dalam Konflik Internal PDI 1976–1998." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 179–192. <https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.11162>.
- Fealy, Greg. Percikan Api Mukhtar NU 1994. dalam Greg Barton & Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKiS, 1996.
- Fealy, Greg. Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU. dalam Greg Fealy & Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKiS, 1996.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Lkis, 2012.
- Feillard, Andree. "Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaharuan." dalam Ellyasa KH. Darwis (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1994) (1994).

- Feillard, Andree. "Islam Tradisional dan Tentara dalam Orde Baru." *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama dengan Negara*. LKiS (1997).
- Fealy, Greg and Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. LKiS.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: pendekatan fikih dalam politik*. PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Ida, Laode. *Anatomi Konflik, NU, Elit Islam, dan Negara*. Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Indonesia, Arsip Nasional Republik. "Naskah Sumber Arsip: Jejak Demokrasi Pemilu 1955." *Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia* (2019).
- Kuntowijoyo. *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Majalah Aula. "Mereka Menanggapi Hasil Muktamar." Januari 1985.
- _____. "Garapan NU Setelah Muktamar." Maret 1985.
- _____. "Mengapa NU Menerima Asas Tunggal Pancasila?" Maret 1985.
- _____. "Presiden: Keputusan Muktamar Koreksi Terhadap Kesalahan Ideologis." Maret 1985.
- _____. "NU-MA Sebuah Contoh Kerja sama." Mei 1986.
- _____. "Kajian Naiknya Jumlah Kursi Non NU." Juli 1987.
- _____. "Politik Orang Tidak Berpolitik." Mei 1991.
- _____. "Mengawal Zaman: Renungan Hari Ulang Tahun ke-16 Majalah Aula," Februari 1993.
- _____. "Anak Petani yang Menjadi Bapak Bangsa." Maret 1993.
- _____. "Bau Politik di Munas RMI." Maret 1994.
- _____. "NU Butuh Perlindungan, Pemerintah Butuh Bimbingan." Januari 1995.
- _____. "Menilai Klip PBNU." Februari 1996.
- _____. "Membesarkan PRD, Melupakan Masalah." September 1996.
- _____. "Semua Sama Susah." November 1996.
- _____. "Krisis Politik Akan Berlangsung Lima tahun." Maret 1998.
- _____. "Kabinet Musim Badai." April 1998.
- _____. "Melungsur Lengseran Soeharto." Juni 1998.
- Muhtadi, Asep Saepulah. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*. LP3eS, 2004.

- Sholikha, Lia Hadis. *Sejarah Perkembangan Majalah Aula Tahun 1978–2019*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Suara Karya. *"Kerusuhan di Jakarta Ditunggangi PRD."* 30 Juli 1996.
- Tempo. *"Suara-suara di Tengah Forum."* 13 April 1991.
- Van Bruinessen, Martin. *NU; Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Lkis Pelangi Aksara, 1994.